

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Umum.....	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penulisan	5
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2. Sumber Data	5
1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data	6
1.4.3.1. Observasi	6
1.4.3.2. Wawancara.....	6

1.4.3.3. Studi Kepustakaan.....	6	
1.4.3.4. Analisis Data.....	6	
1.5. Sistematika Penulisan Skripsi	7	
BAB II TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020		
DAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA		
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1589/SK-		
KH.02.01/XII/2021		
2.1 Pemerintah Daerah		
2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah	10	
2.1.2. Kepala Daerah	13	
2.2 Peraturan Daerah	14	
2.2.1. Pengertian Peraturan Daerah.....	14	
2.2.2. Azas Pembentukan Peraturan Daerah	15	
2.2.3. Pembentukan Peraturan Daerah	17	
2.2.4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah	17	
2.2.5. Fungsi Peraturan Daerah	20	
2.3 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020		20
2.4 Kementerian	23	
2.4.1. Pengertian Kementerian.....	23	
2.4.2. Menteri	26	
2.4.3. Tugas dan Tanggungjawab Menteri	28	
2.5 Keputusan Menteri.....	28	
2.5.1. Pengertian Keputusan Menteri	28	

2.5.2. Pembentukan Keputusan Menteri	29
2.5.3. Fungsi Keputusan Menteri.....	31
2.6 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	31
2.7 Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021	

**BAB III KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA POBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1589/SK-
KH.02.01/XII/2021 SERTA DAMPAK YURIDISNYA**

1.1. Kedudukan derajat hukum serta kekuatan mengikat dari Keputusan Menteri jika dikaitkan dengan kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan perundang- undangan.....	36
1.1.1. Kedudukan Lembaga kementerian dan pemerintah daerah.....	54
1.1.2. Ruang lingkup berlakunya keputusan menteri dan peraturan daerah.....	46
1.1.3. Materi muatan yang diatur keputusan menteri dan peraturan daerah.....	46
1.2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 jika dihadapkan dengan Keputusan Menteri	

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021	49
1.3. Dampak secara yuridis dengan adanya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021 terhadap para pengembang perumahan di Kota Probolinggo.	57
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii